

PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH

SULFIANTY

Email : anthycahaya@yahoo.co.id

STIE ICHSAN POHUWATO

ABSTRAK

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, sesuai sistem akuntansi keuangan regional yang diperlukan yang merupakan bagian dari akuntansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan regional terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pohuwato. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah seluruh Pegawai Negeri Sipil di BPKAD Kabupaten Pohuwato sebanyak 48 orang, oleh karena itu jumlah total dipilih sebagai responden. Data dianalisis menggunakan regresi berganda. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan sistem akuntansi keuangan regional yang terdiri dari grafik perkiraan standar yang seragam (X1), sistem pencatatan entri ganda (X2), dan basis akuntansi (X3), sekaligus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 0,697 atau 69,7%. penerapan sistem akuntansi keuangan regional dalam bentuk: grafik perkiraan standar seragam (X1), secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 1,298. sistem pencatatan entri ganda (X2), secara parsial memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) pada 0,398. dasar akuntansi (X3), secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) sebesar 0,923.

Kata kunci: *sistem akuntansi, keuangan regional, perkiraan standar yang seragam, sistem pencatatan entri ganda, basis akuntansi, kualitas laporan keuangan.*

ABSTRACT

The implementing of regional autonomy and decentralization, accordingly a regional financial accounting system required which is part of accounting government. This study aims to determine the effect of the application of regional financial accounting systems on the quality of regional financial reports in the Pohuwato District Regional Financial and Asset Management Agency. The population in this study is the number of all Civil Servants in Pohuwato District BPKAD as many as 48 people, therefore the total number was chosen as respondents. Data were analyzed using multiple regression. The results of this study are the application of a regional financial accounting system which consists of a uniform standard estimate chart (X1), double entry recording system (X2), and accounting basis (X3), simultaneously having a

positive and significant effect on the quality of financial statements (Y) equal to 0.697 or 69.7%. the application of regional financial accounting systems in the form of: a uniform standard estimate chart (X1), partially positive and significant effect on the quality of financial statements (Y) at 1,298. double entry recording system (X2), partially has a positive but not significant effect on the Quality of Financial Statements (Y) at 0.398. accounting basis (X3), partially positive and significant effect on the Quality of Financial Statements (Y) of 0.923.

Key words: *regional financial accounting systems, uniform standard estimates, double entry recording systems, accounting bases, quality of financial statements.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penerapan sistem akuntansi pemerintahan suatu negara akan sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara yang bersangkutan. Negara Indonesia telah menetapkan standar akuntansi pemerintahannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun. Adapun pengertian standar akuntansi pemerintah menurut Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 yaitu “prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”.

Meskipun seperangkat perundangan dan peraturan mengenai pengelolaan keuangan telah memadai, pelaksanaan pengelolaan keuangan negara tersebut masih rentan terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan uang publik. Penerapan sistem keuangan pada prakteknya tidak terlepas dari persepsi, wawasan, dan

profesionalisme dari aparatur pemerintahnya itu sendiri (Jannaini, 2012:4). Hal ini berimplikasi terhadap kualitas laporan keuangan yang dibuat oleh setiap satuan kerja pemerintah.

Sejalan dengan sistem pertanggungjawaban laporan keuangan yang merupakan suatu tuntutan dan kebutuhan publik, yang merupakan salah satu upaya dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang baik, maka perlu adanya sebuah sistem akuntansi yang sangat tepat digunakan, hal ini dimaksudkan agar laporan keuangan yang dihasilkan adalah laporan yang handal, relevan dan dapat dipercaya sehingga dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan pengendalian interen yang lemah dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan.

Selain sistem akuntansi yang

handal, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, maka diperlukan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang merupakan bagian dari akuntansi pemerintahan, yang biasa juga disebut Standar akuntansi sektor publik.

Menurut Mohammad Mahsun (2006:178-179), mengemukakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah meliputi : (1). Bagan Perkiraan Standar yang Seragam, perkiraan yang digunakan unit akuntansi dan mata anggaran pada unit operasional anggaran dan pelaksanaan anggaran sama, baik klasifikasi maupun istilahnya agar dapat memastikan bahwa anggaran dan laporan realisasinya menggunakan istilah yang sama, serta meningkatkan kemampuan sistem akuntansi untuk memberikan informasi atau laporan yang relevan, berarti, dan dapat diandalkan. (2). Sistem Pencatatan Pembukuan Berpasangan (Double Entry), Sistem pencatatan yang digunakan pada akuntansi keuangan daerah adalah sistem double entry, double entry sering juga disebut sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Pencatatan dengan sistem ini disebut istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut ada sisi debit dan kredit, setiap peencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi, dan (3).

Basis Akuntansi (Pengakuan/Dasar), pengakuan adalah proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam paragraf 83 dalam neraca atau laporan laba rugi. Kriteria pengakuan tersebut ada 2 yaitu : Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari kedalam entitas; dan Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Dasar akuntansi yang digunakan pada Akuntansi Keuangan Daerah adalah : Basis Kas, menetapkan bahwa pengakuan/ pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas, dan Basis Akrua, adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar). Oleh karena itu pertanggungjawaban laporan keuangan pada sebuah organisasi sektor publik, merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Namun demikian dari hasil pengamatan peneliti di lapangan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada BPKAD Kabupaten Pohuwato masih terdapat kekurangan dan jika hal tersebut dibiarkan secara terus menerus tentunya akan berdampak

pada Kualitas pelaporan keuangan. Oleh karena itu penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sangat perlu mendapat perhatian sehingga dapat membantu jalannya aktivitas pada BPKAD Kabupaten Pohuwato.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang terdiri dari Bagan Perkiraan Standar yang seragam (X_1), Sistem Pencatatan Double Entry (X_2), dan Basis akuntansi (X_3) secara *simultan* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada BPKAD Kabupaten Pohuwato.
2. Bagaimana pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang terdiri dari Bagan Perkiraan Standar yang seragam (X_1), Sistem Pencatatan Double Entry (X_2), dan Basis akuntansi (X_3) secara *parsial* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada BPKAD Kabupaten Pohuwato.

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang terdiri dari Bagan

Perkiraan Standar yang seragam (X_1), Sistem Pencatatan Double Entry (X_2), dan Basis akuntansi (X_3) secara *simultan* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada BPKAD Kabupaten Pohuwato.

- b. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang terdiri dari Bagan Perkiraan Standar yang seragam (X_1), Sistem Pencatatan Double Entry (X_2), dan Basis akuntansi (X_3) secara *parsial* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada BPKAD Kabupaten Pohuwato.

B. KAJIAN TEORI

1. Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi Keuangan Daerah, menurut Abdul Halim (2002:35), adalah suatu proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi keuangan dari suatu daerah (propinsi, kabupaten, dan kota) yang dijadikan suatu informasi dalam rangka suatu keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Jones dan Pendlebury dalam Ihyaul Ulum MD (2005:6), mengemukakan bahwa sektor publik dapat dipahami lebih jelas bila dihubungkan dengan istilah akuntan publik. Di Amerika Serikat istilah ini adalah untuk akuntan

swasta yang berpraktek untuk masyarakat, sedangkan di Inggris istilah tersebut adalah akuntan yang bekerja di organisasi pemerintah.

Sebagai salah satu aspek perwujudan otonomi daerah sebagaimana dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2004, akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bidang akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi. Sistem akuntansi keuangan daerah meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan dalam pelaksanaan APBD yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum.

Akuntansi Keuangan Daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, maka di dalam akuntansi keuangan daerah juga terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi di pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum.

2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi Keuangan Daerah merupakan salah satu jenis akuntansi, maka di dalam akuntansi keuangan daerah juga terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi-transaksi

ekonomi yang terjadi di pemerintah daerah.

Pemerintah Indonesia sudah menetapkan standar akuntansi untuk pemerintahan yang disebut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar ini dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi sektor publik yang memuat rumusan secara terperinci elemen-elemen standar akuntansi.

Kemudian Mohammad Mahsun, dkk (2006:178-179), berikut ini Sistem Akuntansi Keuangan Daerah meliputi :

a. Bagan Perkiraan Standar yang Seragam

Bagan perkiraan standar dan kode perkiraan mutlak diperlukan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pencatatan akuntansi. Dengan adanya standarisasi perkiraan berikut kodenya memungkinkan perlakuan akuntansi yang seragam dan konsisten sehingga mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi di tingkat daerah maupun ditingkat pusat.

b. Sistem Pencatatan Pembukuan Berpasangan (Double Entry)

Sistem pencatatan yang digunakan pada akuntansi keuangan daerah adalah sistem double entry, double entry sering juga disebut sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Pencatatan dengan sistem ini

disebut istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut ada sisi debit dan kredit, setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi.

3. Basis Akuntansi (Pengakuan/Dasar)

Dasar akuntansi yang digunakan pada akuntansi keuangan daerah adalah Basis Kas, menetapkan bahwa pengakuan/pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Apabila transaksi belum menimbulkan perubahan pada kas, maka transaksi tersebut tidak dicatat. Dan Basis Akrua, adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar). Oleh karena itu, transaksi dan peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode yang terjadi.

4. Kualitas Laporan Keuangan

Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 (2011:10-12) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa karakteristik laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Oleh karena itu diperlukan prasyarat normatif yang

diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki antara lain relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Lebih lanjut Darise (2006:248), mengemukakan bahwa akurat adalah tindakan yang mencerminkan ketelitian, kecermatan, dan ketepatan. Relevan adalah keadaan yang sesuai dengan kondisi yang objektif sekarang dan masa datang. Sedangkan dapat dipertanggungjawabkan adalah kondisi atau fakta yang dapat dibandingkan secara angka nominal dan matematis.

Kemudian dalam laporan pertanggungjawaban keuangan setiap SKPD menyajikan informasi bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam

kegiatan entitas Laporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun empat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

5. Komponen Laporan Keuangan

Informasi keuangan yang disajikan dan disampaikan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah mencakup: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan realisasi APBD termasuk perubahannya, Neraca, Laporan arus kas, Catatan atas laporan keuangan, Dana Dekonsentrasi dan dana Tugas pembantuan, Laporan keuangan perusahaan daerah, dan Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kepastian fiskal daerah. Demikian halnya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 (2011) dalam Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa komponen laporan keuangan pemerintah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran, laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya

ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Neraca, laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
3. Laporan Arus kas, laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
4. Catatan atas Laporan Keuangan, laporan yang meliputi catatan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Selain laporan keuangan pokok tersebut, entitas pelaporan diperkenankan menyajikan laporan kinerja keuangan, laporan perubahan ekuitas. salah satu tujuan dari akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan

yang handal, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan datang.

6. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

1. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang terdiri dari Bagan Perkiraan Standar yang seragam (X_1), Sistem pencatatan *Double Entry* (X_2), dan Basis akuntansi (X_3) secara *simultan* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pohuwato.
2. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang terdiri dari Bagan Perkiraan Standar yang seragam (X_1), Sistem pencatatan *Double Entry* (X_2), dan Basis akuntansi (X_3) secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pohuwato.

C. METODE PENELITIAN

1. Obyek Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka yang menjadi obyek penelitian adalah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas pelaporan Keuangan pada BPKAD Kabupaten Pohuwato.

2. Desain Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis memilih jenis penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan angka-angka dan kata-kata atau kalimat dan gambar dengan memakai sampel dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah semua nilai baik perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, dari pada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas. Menurut Arikunto dalam Riduwan (2004 : 276), mengemukakan bahwa apabila jumlah sampel kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya dikatakan penelitian Populasi. Oleh karena itu,

berkaitan dengan jumlah seluruh Pegawai Negeri Sipil yang ada pada BPKAD Kabupaten Pohuwato sebanyak 48 Orang, maka keseluruhan jumlah tersebut terpilih sebagai responden.

4. Sumber-Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti, misalnya daftar pertanyaan yang dibagikan kepada pegawai yang ada pada BPKAD Kabupaten Pohuwato.

2. Data Sekunder

Yaitu merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram, misalnya pelaporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Pohuwato.

5. Prosedur Penelitian

Untuk mendapatkan data yang baik dalam arti mendekati kenyataan (obyektif) sudah tentu diperlukan suatu instrumen atau alat pengumpul data yang baik dan yang lebih penting lagi adanya alat ukur yang valid dan andal (*reliable*). Dan untuk dapat meyakini bahwa

instrumen atau alat ukur yang valid dan andal, maka instrumen tersebut sebelum digunakan harus diuji validitas dan reliabilitasnya sehingga apabila digunakan akan menghasilkan data objektif.

6. Metode Analisis

Pengujian terhadap hipotesis-hipotesis di atas dilakukan test statistik dengan menggunakan analisis regresi berganda, dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Y : Kualitas Pelanggaran Keuangan

A : Konstanta

b_1, b_2

b_3 : Koefisien Regresi

X1 : Bagan Perkiraan Standar yang seragam

X2 : Sistem Pencatatan Produk Double Entry

X3 : Basis Akuntansi

e : Error term (Variabel luar yang tidak dijelaskan dalam model)

Sedangkan untuk mengetahui apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak, maka dilanjutkan dengan pengujian hipotesis baik melalui uji T maupun uji F.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Uji Validitas dan realibilitas

Berdasarkan hasil uji validitas dapat disimpulkan bahwa semua

item pernyataan mengenai variabel penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang terdiri dari Bagan Perkiraan Standar yang seragam (X_1), Sistem Pencatatan Double Entry (X_2), dan Basis akuntansi (X_3) dan Variabel Terikat Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) pada BPKAD Kabupaten Pohuwato yang terdapat dalam daftar pernyataan (kuesioner) dianggap valid karena r menunjukkan positif dan t -hitung $>$ t -tabel. Sedangkan untuk hasil uji

diperoleh angka reliabilitas (r_i) untuk seluruh item pernyataan pada setiap penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang terdiri dari Bagan Perkiraan Standar yang seragam (X_1), Sistem Pencatatan Double Entry (X_2), dan Basis akuntansi (X_3) dan Variabel Terikat Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y). ($Y_i > 0$ (lebih besar dari Nol), sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan dikatakan reliabel.

a. Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1971.548	3	657.183	33.736	.000 ^b
Residual	857.118	44	19.480		
Total	2828.667	47			

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang terdiri dari Bagan Perkiraan Standar yang seragam (X_1), Sistem Pencatatan Double Entry (X_2), dan Basis akuntansi (X_3), secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) pada BPKAD Kabupaten Pohuwato. Dengan demikian hipotesis yang diajukan pada penelitian ini dapat

diterima. Untuk mengetahui besarnya kontribusi variasi variable bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang terdiri dari Bagan Perkiraan Standar yang seragam (X_1), Sistem Pencatatan Double Entry (X_2), dan Basis akuntansi (X_3) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) dapat dilihat pada besarnya koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,697 atau 69,7 % sebagaimana pada tabel berikut:

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.835 ^a	.697	.676	4.41361

a. Predictors: (Constant), Basis Akuntansi (x3), Sistem Pencatatan Double Entry (x2), Bagan Perkiraan Standar yang Seragam (x1)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang terdiri dari Bagan Perkiraan Standar yang seragam (X₁), sistem

simultan mempunyai kontribusi sebesar 69,7% kualitas laporan keuangan (Y), sedangkan sisanya 30,3 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti atau tidak dijelaskan dalam model.

b. Uji Parsial (Uji-t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	2.872	6.872		.418	.678
bagan perkiraan standar yang seragam (x1)	1.298	.273	.541	4.762	.000
sistem pencatatan double entry (x2)	.398	.443	.097	.899	.374
basis akuntansi (x3)	.923	.363	.301	2.547	.014

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sub variabel Bagan Perkiraan Standar yang

seragam (X₁) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas kualitas laporan keuangan pada taraf signifikansi alpha (α) = 5% (0.05) sebesar 1,298, sub variabel Sistem Pencatatan Double Entry

(X_2) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada taraf signifikansi $\alpha = 5\%$ (0.05) sebesar 0,398. dan sub variabel basis akuntansi (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas kualitas laporan keuangan sebesar 0,398. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa hipotesis yang di ajukan pada penelitian ini dapat diterima.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari pembahasan hasil penelitian di atas, maka dapat dikemukakan kesimpulan bahwa:

1. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang terdiri dari Bagan perkiraan standar yang seragam (X_1), sistem pencatatan *double entry* (X_2), dan Basis akuntansi (X_3), secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y) pada BPKAD Kabupaten Pohuwato sebesar 0,697 atau 69,7%.
2. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berupa: bagan perkiraan standar yang seragam (X_1), secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y) pada BPKAD Kabupaten Pohuwato sebesar 1,298. sistem pencatatan *double entry* (X_2), secara parsial berpengaruh

positif namun tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) pada BPKAD Kabupaten Pohuwato sebesar 0,398.

Basis akuntansi (X_3), secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y) pada BPKAD Kabupaten Pohuwato sebesar 0,923.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Di sarankan kepada pengambil kebijakan pada pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato agar senantiasa menerapkan sistim akuntansi keuangan daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah karena berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa dengan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Pohuwato.
2. Di sarankan kepada pengambil kebijakan agar mengevaluasi sistem pencatatan *double entry* pada sistim akuntansi keuangan daerah karena hasilnya belum signifikan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2011. Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Anonim, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71. 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*, Penerbit Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta
- Arikunto, 2001, *Metode Penelitian*, Penerbit Gramedia, Jakarta.
- Al. Haryono Yusup, 2005, *Dasar-dasar Akuntansi*, Penerbit STIE YKPN Yogyakarta.
- Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT. Indeks Kel Gramedia
- Ihyaul Ulum MD, 2005, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang
- , 2004, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang
- Jannaini, Yuli. 2012. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. Bandung: Program Studi Universitas Komputer Indonesia